



Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan di Sumatera Utara (*Economic growth and human well-being*)

DONAR SAGALA^{1*}

¹ Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

*Correspondence: donar.sagala@ui.ac.id

Received Date: January 25, 2024

Accepted Date: January 31, 2024

ABSTRACT

The aim of this research is to see how economic growth, poverty, and welfare levels in North Sumatra Province, Indonesia, relate to each other. This research investigates how these components interact in regional development using various theoretical frameworks. This research method involves the analysis of secondary data from North Sumatra Province, including data on economic growth, poverty levels, and indicators of people's welfare. Economic data will be evaluated using economic growth theory, and factors such as access to clean water, electricity, schools, health facilities, and infrastructure will be considered in the poverty and welfare analysis. It is hoped that the results of this research will provide in-depth insight into how economic growth impacts community welfare and poverty levels at the provincial level. It is hoped that this research will provide policy benefits for local governments as they create plans for sustainable economic development, improve community welfare, and overcome poverty.

Keywords: *economic growth; North Sumatra; poverty; well-being*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, berhubungan satu sama lain. Penelitian ini menyelidiki bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi dalam pembangunan regional dengan menggunakan berbagai kerangka teoritis. Metode penelitian ini melibatkan analisis data sekunder dari Provinsi Sumatera Utara, termasuk data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan indikator kesejahteraan rakyat. Data ekonomi akan dievaluasi menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, dan faktor-faktor seperti akses air bersih, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur akan dipertimbangkan dalam analisis kemiskinan dan kesejahteraan. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kebijakan bagi pemerintah daerah saat mereka membuat rencana pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan; kesejahteraan; pertumbuhan ekonomi; Sumatera Utara

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang menjunjung tinggi persaingan yang

Cite This Article:

Sagala, D. (2024). Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan di Sumatera Utara (Economic growth and human well-being). *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 1(2), 107-119.
<https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i2.2024.466>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



sehat dan keadilan, serta berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian global dan regional. Pembangunan ekonomi termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi. Tingkat perkembangan ekonomi ditentukan dengan menggunakan indikator yang mengukur kemajuan dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, sedangkan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Gross National Product (GNP). Pertumbuhan ekonomi sering kali berlawanan dengan pembangunan ekonomi, dan dapat dipandang sebagai peningkatan kekayaan ekonomi suatu bangsa guna menjamin kehidupan yang lebih baik bagi penduduknya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting, tetapi tidak wajib untuk mencatat perkembangan ekonomi (Drăgoi, D. 2020).

Pertumbuhan ekonomi oleh Harrod-Domar (1946) yang memperkenalkan tabungan dan produktivitas investasi modal atau disebut rasio modal-output sebagai istilah baru untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut diperluas dengan menambahkan tenaga kerja sebagai faktor produksi dan menerima semua asumsi dalam model sebelumnya kecuali asumsi proporsi tetap diterapkan pada rasio modal-output oleh Solow (1956). Berdasarkan model Solow, pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat dicapai melalui kemajuan teknologi dan faktor ini dapat membantu dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi antar negara. Romer (1986) mengembangkan teori pertumbuhan dengan cara yang berbeda untuk mengkritik model Solow. Penentu utama pertumbuhan ekonomi dalam model ini diasumsikan endogen daripada eksogen. Teori pertumbuhan endogen baru memperkenalkan bagaimana investasi dalam pengetahuan dan sumber daya manusia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui limpahan pengetahuan (Nurmalia, dkk 2020).

Tingkat kesejahteraan tidak terlepas dari masalah kemiskinan, Menurut World Bank (Bank Dunia) dalam *World Bank Institute* (2005), kemiskinan adalah deprivasi dalam kesejahteraan. Berdasarkan definisi tersebut kemiskinan dapat dipandang dari beberapa sisi. Dari pandangan konvensional kemiskinan dipandang dari sisi moneter, yaitu kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan/konsumsi individu dengan beberapa Batasan tertentu, jika mereka berada di bawah batasan tersebut, maka mereka dianggap miskin. Kemakmuran ditentukan oleh beberapa faktor. Ini termasuk ketersediaan listrik, air bersih, dan fasilitas pendidikan; tingkat kesehatan dan fasilitas perawatan yang tersedia; keadaan perumahan masyarakat miskin; dan taraf perkembangan infrastruktur (Sukirno, 2012). Pengelolaan air bersih adalah salah satu masalah terpenting di Indonesia karena akses yang sulit dan pemeliharaan infrastruktur yang kurang efektif (McCawley, 2015). Hasil studi empiris yang dilakukan oleh Mills dan Pernia (1993) menggunakan metode analisis lintas negara menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara akan semakin rendah jika pertumbuhannya pada tahun-tahun sebelumnya tinggi, dan semakin tinggi laju pertumbuhan PDB semakin cepat penurunan tingkat kemiskinan di negara tersebut (Tambunan, 2011). Pembangunan ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Untuk mencapai penduduk yang sejahtera, diperlukan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai penunjuk yang tepat untuk memonitor pencapaian kesejahteraan rakyat.

2. Permasalahan

Pada tulisan ini, penulis mengangkat beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Sumatera Utara sebagai berikut :

⇒ Pertumbuhan ekonomi rendah karena infrastruktur yang belum memadai.

- ⇒ Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dimana pembangunan masih terpusat di daerah perkotaan dibandingkan daerah kabupaten.
- ⇒ Disparitas Pembangunan Manusia di Sumatera Utara, ada perbedaan yang jauh antara IPM daerah perkotaan dengan kabupaten.

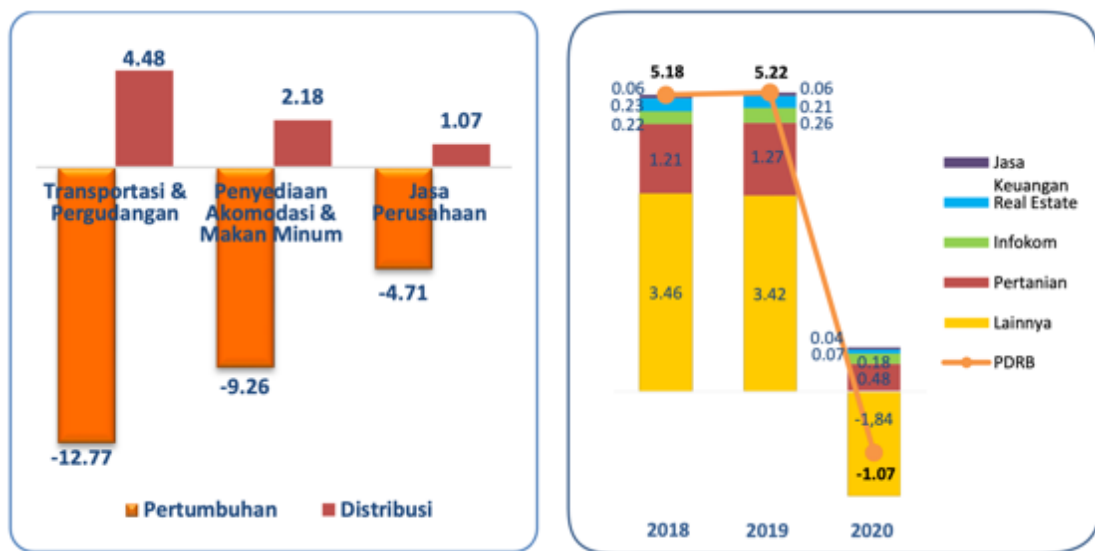
3. Analisis dan Kesimpulan

a. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,22%. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan terbesar sebesar 12,77% dalam hal produksi, dan komponen ekspor barang dan jasa mengalami penurunan terbesar sebesar 10,36% dalam hal pengeluaran.

Tahun 2020, ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar 1,1%. Beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi terbesar, dengan Transportasi dan Pergudangan mencapai 12,77%, diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26%, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71%.

Sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020 tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,48%, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,18%, properti sebesar 0,07%, dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Di sisi lain, sektor usaha lain mengalami kontraksi sebesar 1,84%.



(a)(b)

Gambar 1: (a) Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020, (b) Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 2018-2020 (persen)

Indikator Kesejahteraan

Angka kemiskinan di Sumatera Utara naik 0,39 poin, dari 8,75% pada Maret 2020 menjadi 9,14% pada September 2020. Ini setara dengan 1,36 juta orang pada September 2020, atau naik sekitar 73 ribu orang dalam satu semester terakhir. Pada September 2020, Garis Kemiskinan tercatat sebesar Rp. 505.236,- per bulan untuk setiap orang, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 378.617,- (74,94 persen) dan Garis

Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 126.619,-, yang merupakan sekitar 25,06 persen dari total.



Gambar : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2008 – 2020

Pembangunan Infrastruktur

Dari data Kompas (2020), jika dibandingkan dengan jalan nasional di daerah lain di Pulau Sumatra, kondisi infrastruktur jalan nasional di Sumatra Utara masih sangat buruk. Ratusan kilometer jalan nasional telah rusak, dan beberapa masih berupa tanah. Namun, perlu diingat bahwa Provinsi Sumatra Utara telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia. Provinsi Sumatra Utara hanya kalah dari Provinsi Riau, yang memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 2 juta hektare, dari 1,1 juta hektare, atau 24 persen dari total wilayah daratan seluas 72.000 km persegi. Kebun sawit ini berkontribusi pada pemasukan negara sebesar ratusan triliun rupiah, tetapi seringkali terhambat oleh pembangunan infrastruktur yang lambat.

Dikutip dari harian Analisa (2018) Sumut Kurang Anggaran Pembangunan Infrastruktur, Kadis Bina Marga Sumut Abdul Haris Lubis mengatakan untuk memenuhi anggaran pembiayaan infrastruktur tersebut perlu mencari sumber pembiayaan alternatif seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBSU). Dari 3.048,5 KM panjang jalan provinsi rusak ringan 478,30 KM atau 15,69 %, dan 291,85 KM atau 9,57 % masih berupa jalan tanah. Ada beberapa permasalahan yang membuat jalan rusak, antara lain pengerasan tidak memenuhi standar, bencana alam seperti gempa di darat, letusan gunung berapi, tanah longsor yang mencapai 40-50 % dari ruas jalan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sektor infrastruktur sangat penting. Namun, terbukti bahwa sektor infrastruktur di Sumut adalah yang paling sering terlibat dalam kasus korupsi. Menurut TR. Arif Faisal, Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi untuk Pendidikan Rakyat (Sahdar) Sumut, ada beberapa LSM yang serius menangani masalah di Sumut, tetapi ada juga LSM yang "nakal" hanya untuk mendapatkan proyek. Bahkan, Arif menganggap korupsi sebagai masalah sosial dan bukan lagi masalah hukum. Dari tahun 2011 hingga saat ini, korupsi infrastruktur telah meningkat. Dia mengatakan, "Ada aturan yang diganti tetapi perilaku tidak berubah, jadi sama saja. Seharusnya ada kompetisi jika ada proyek pembangunan, tetapi yang terjadi adalah monopoli, seperti yang terjadi di Sumut." Secara umum, mayoritas orang di Sumatera Utara menganggap tingkat korupsi telah meningkat 54% dalam dua tahun terakhir, menurut Ahmad Khoiril Umam dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) (Wartaekonomi, 2019).

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2018-2023 lima sasaran utama pembangunan sumatera utara, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen dan angka inflasi diharapkan pada kisaran 2,75 persen plus minus 1 persen. Kemudian, penurunan

angka kemiskinan menjadi 7,39 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen. Namun jika dilihat dari data pencapaian pertumbuhan ekonomi belum capai target dan kemiskinan juga masih tinggi. Salah satu penyebab dari pertumbuhan ekonomi yang belum tercapai dikarenakan kurang memadainya pembangunan infrastruktur seperti telah dijabarkan di atas, infrastruktur yang baik seperti akses jalan yang memadai akan berdampak pada kelancaran distribusi logistik. Distribusi barang dan jasa yang cepat akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

b. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ekonomi berkembang lambat, baik antardaerah maupun antarnegara. Ada perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan fenomena kesenjangan. Menurut data distribusi PDRB antar kabupaten dan kota di Sumatera Utara (lampiran 2), ada perbedaan yang sangat signifikan. Wilayah seperti Pakpak Bharat, Nias Barat, dan Nias Utara memiliki tingkat PDRB yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ini jauh tertinggal secara ekonomi.

Menurut Myrdal, asal-usul kesenjangan antardaerah, juga dikenal sebagai kesenjangan wilayah, berakar pada masalah non-ekonomi dan terkait erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motivasi ini mendorong pembangunan di daerah-daerah yang menjanjikan laba tinggi, sedangkan daerah-daerah yang tidak menjanjikan laba akan terbelakang atau stagnasi. Selama tahap awal pembangunan, Williamson menemukan bahwa kesenjangan atau disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah tertentu. Namun, ketika ekonomi berkembang lebih jauh, disparitas tampak berkurang dan keseimbangan antara daerah terlihat (Kuncoro, 2004).

Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten yang disebutkan di atas termasuk akses yang tidak memadai. Kekurangan infrastruktur jalan dan fasilitas lainnya menyebabkan sentra ekonomi di daerah tersebut tidak berkembang.

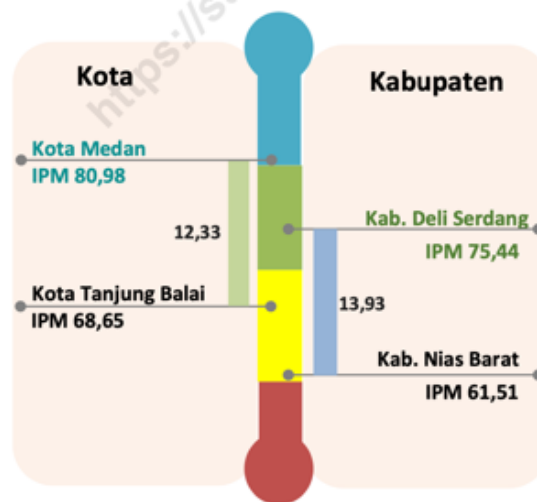
c. Disparitas Pembangunan Manusia di Wilayah Kabupaten dan Kota

Disparitas atau perbedaan pencapaian pembangunan antar daerah bukan merupakan hal baru bagi Indonesia khususnya Sumatera Utara. Kompleksitas berbagai faktor seperti sumber daya manusia, letak geografis, sejarah, dan ketidakmerataan sumber daya alam merupakan hal yang masih menjadi kendala dalam menuju konvergensi pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan pemerataan pendapatan melalui penurunan indeks gini menjadi 0,305 termasuk dalam lima sasaran utama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara 2018-2023. Tahun 2020 Gini Ratio Sumatera Utara sebesar 0,316, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih cukup tinggi.

Disparitas pembangunan manusia dalam perspektif kabupaten/kota memberikan gambaran tentang kinerja secara umum pembangunan manusia di tingkat provinsi. Sampai dengan tahun 2020, disparitas pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Sumatera Utara terlihat dari capaian Kota Medan dengan IPM tertinggi (80,98) dan Kabupaten Nias Barat dengan capaian IPM terendah (61,51). Selama 2016 hingga 2020, disparitas nilai IPM diantara kabupaten/kota di Sumatera Utara cenderung menurun.

Perbedaan pencapaian pembangunan manusia antar kabupaten dan kota di Sumatera Utara cukup signifikan. Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota, meliputi 8 wilayah kota dan 25 wilayah kabupaten. Tidak dapat dipungkiri bahwa kota memiliki daya tarik tersendiri dibanding kabupaten. Kota menyediakan berbagai macam fasilitas yang memadai sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan mudah. Kemudahan akses yang tersedia di kota cukup banyak, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi,

sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik umumnya kota lebih maju dibandingkan kabupaten.



Gambar : Perbandingan IPM Kabupaten dengan Kota di Sumatera Utara Tertinggi dan Terendah, 2020

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,32 persen sesuai target RPJMD 2018 – 2023 masih jauh dari pencapaian saat ini, dimana kalau dilihat dari per kabupaten/kota masih ada yang diangka terendah 61.51 ini menjadi tantangan kedepan dalam pemerataan pembangunan manusia. Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Nias menjadi daerah dengan IPM terendah, salah satu faktornya adalah lama rata-rata sekolah masih jauh dibawah yaitu sekitar 5,5 – 6,5 tahun (lampiran 5).

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di propinsi Sumatera Utara. Pembangunan infrastruktur seperti jalan yang kurang memadai menjadi penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pembangunan antardaerah di Sumatera Utara masih tinggi dimana penumpukan kegiatan ekonomi masih di daerah tertentu, pertumbuhan kota metropolitan yang tidak terkendali yang mengakibatkan kualitas lingkungan perkotaan semakin menurun, kurang adanya keterkaitan kegiatan pembangunan antara perkotaan dengan perdesaan, karena pembangunan masih terfokus pada daerah perkotaan hal ini berdampak pada peningkatan mutu pembangunan manusia di daerah masih tertinggal. Daerah Nias dengan IPM terendah disebabkan lama rata-rata sekolah yang masih rendah.

4. Rekomendasi Kebijakan

Diharapkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan akan ditingkatkan dengan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Menggerakkan sektor strategis ekonomi daerah untuk mencapai kemandirian ekonomi adalah salah satu tujuan utama pembangunan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan operasional berikut direkomendasikan:

Dalam RPJMD 2018–2023, Sumatera Utara memiliki sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Perbaikan infrastruktur seperti jalan harus dilakukan oleh daerah kabupaten/kota untuk memudahkan perpindahan barang dan jasa. Ini akan meningkatkan ekonomi dan memberikan daya tarik bagi investor untuk membangun bisnis.

Pemerintah daerah kabupaten/kota harus meningkatkan investasi di wilayahnya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi di luar kota-kota dengan daya dukung dan daya tampung yang menurun, sentra ekonomi dan penyebaran penduduk harus tersebar secara merata. Dengan demikian, untuk mendorong minat investasi, infrastruktur dan akses transportasi harus dibangun.

Pemerintah daerah kabupaten/kota harus menggunakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan lebih baik untuk kebijakan belanja daerah yang efektif dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pembangunan infrastruktur. Sumber daya manusia akan menjadi lebih baik dengan peningkatan akses ke pendidikan berkualitas tinggi dan kesehatan di daerah.

Referensi

- Analisadaily, 2018. Sumut Kurang Anggaran Pembangunan Infrastruktur <https://analisadaily.com/berita/arsip/2018/3/20/524216/sumut-kurang-anggaran-pembangunan-infrastruktur/>
- BPS Sumut, 2021. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020*. <https://sumut.bps.go.id/publication/2021/01/29/eca629e4d550758eedff416c/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-sumatera-utara-2020.html>
- BPS Sumut, 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2020*. <https://sumut.bps.go.id/publication/2021/01/29/05ab6b7e627ee574998166ea/index-pembangunan-manusia-provinsi-sumatera-utara-2020.html>
- BPS Sumut, 2021. *Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Triwulan IV-2020* <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/838/ekonomi-sumatera-utara-2020-turun-1-07-persen.html>
- Drăgoi, D. (2020). Economic growth versus economic development. *Atlantic Review of Economics*, 4, 1-11. Retrieved from <https://search.proquest.com/scholarly-journals/economic-growth-versus-development/docview/2444521518/se-2?accountid=17242>
- Kuncoro, Mudrajat. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Lubis, K. 2019. Di Sumut, Kasus Korupsi Terbanyak dari Sektor Infrastruktur <https://www.wartaekonomi.co.id/read214548/di-sumut-kasus-korupsi-terbanyak-dari-sektor-infrastruktur>
- McCawley, P. 2015. Infrastructure Policy In Indonesia, 1965 – 2015: A Survey. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 51(2). pp: 263 – 85.
- Nurmalia, Djonni, H., & Muzayanah Irfani, F. U. (2020). The roles of entrepreneurship on regional economic growth in indonesia. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(1), 28-41. doi:<http://dx.doi.org/10.1007/s13132-018-0557-6>

- Sinaga, N. (2017). Asas Pemerataan dalam Percepatan Pembangunan Sumatera Utara. (Kompas.com) Retrieved July 3, 2020, from [https://regional.kompas.com/read/2017/03/03/16330971/asas.pemerataan.dalam.p
ercepatan.pembangunan.sumatera.utara?page=1](https://regional.kompas.com/read/2017/03/03/16330971/asas.pemerataan.dalam.p percepatan.pembangunan.sumatera.utara?page=1)
- Sukirno, S. 2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Tambunan, Tulus, T.H, 2011, Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- World Bank Institute. (2005). Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2020 (juta rupiah)

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Tahun 2018-2020
(juta rupiah)

| Lapangan Usaha | Harga Berlaku | | | Harga Konstan 2010 | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2018 | 2019*) | 2020**) | 2018 | 2019*) | 2020**) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A Pertanian, Kehutanan, & Perikanan | 155 077 171,55 | 164 152 753,56 | 173 083 465,17 | 127 202 647,27 | 133 726 024,44 | 136 332 431,25 |
| B Pertambangan dan Penggalian | 9 552 001,77 | 10 160 529,70 | 10 373 468,64 | 6 792 014,01 | 7 099 794,57 | 6 936 056,85 |
| C Industri Pengolahan | 148 430 312,53 | 152 246 632,64 | 156 503 609,50 | 96 174 604,86 | 97 362 095,28 | 96 548 305,52 |
| D Pengadaan Listrik dan Gas | 840 587,64 | 908 220,96 | 932 381,96 | 694 580,53 | 728 786,41 | 751 850,41 |
| E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 754 749,12 | 796 703,51 | 831 188,44 | 489 606,31 | 516 228,49 | 535 769,86 |
| F Konstruksi | 102 921 371,10 | 113 764 686,54 | 110 280 639,85 | 64 507 110,54 | 69 212 033,32 | 66 843 312,48 |
| G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 134 161 138,07 | 150 445 276,99 | 153 138 152,24 | 90 652 708,85 | 96 936 190,58 | 95 052 136,40 |
| H Transportasi dan Pergudangan | 37 043 610,77 | 40 566 530,77 | 36 382 797,25 | 24 372 509,87 | 25 786 497,39 | 22 492 593,82 |
| I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 17 636 584,91 | 19 379 416,05 | 17 692 132,79 | 12 131 736,74 | 13 209 118,27 | 11 985 585,93 |
| J Informasi dan Komunikasi | 15 154 954,36 | 17 139 666,16 | 18 467 111,50 | 14 024 319,77 | 15 375 557,28 | 16 323 905,70 |
| K Jasa Keuangan dan Asuransi | 22 643 286,54 | 23 344 412,93 | 23 529 581,63 | 14 854 353,07 | 15 138 894,88 | 15 334 759,95 |
| L Real Estat | 37 338 809,72 | 40 942 914,76 | 42 721 953,94 | 21 740 027,53 | 22 792 552,75 | 23 149 984,67 |
| M,N Jasa Perusahaan | 7 649 068,49 | 8 667 230,31 | 8 710 085,65 | 4 678 854,18 | 4 950 740,18 | 4 717 728,95 |
| O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 27 127 842,78 | 29 505 600,70 | 30 254 285,70 | 16 406 844,14 | 17 736 890,42 | 17 866 222,33 |
| P Jasa Pendidikan | 13 527 652,33 | 14 767 591,11 | 15 423 488,45 | 10 418 747,77 | 10 924 946,10 | 11 091 326,70 |
| Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7 273 250,49 | 8 155 278,43 | 8 366 119,89 | 4 977 046,00 | 5 207 258,26 | 5 079 183,69 |
| R,S,T,U Jasa Lainnya | 4 215 035,47 | 4 665 509,13 | 4 592 377,30 | 2 644 915,45 | 2 810 237,01 | 2 705 203,74 |
| PDRB | 741 347 427,64 | 799 608 954,24 | 811 282 839,90 | 512 762 626,90 | 539 513 845,63 | 533 746 358,26 |

Keterangan:

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara

Lampiran 2 : . Distribusi PDRB Kabupaten/Kota ADHB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

| Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018*) | 2019**) |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 Nias | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2 Mandailing Natal | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,69 | 1,68 |
| 3 Tapanuli Selatan | 1,77 | 1,74 | 1,74 | 1,72 | 1,77 |
| 4 Tapanuli Tengah | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,25 |
| 5 Tapanuli Utara | 1,03 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
| 6 Toba | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,99 |
| 7 Labuhanbatu | 4,23 | 4,20 | 4,21 | 4,19 | 4,23 |
| 8 Asahan | 4,65 | 4,63 | 4,64 | 4,63 | 4,65 |
| 9 Simalungun | 4,77 | 4,78 | 4,76 | 4,74 | 4,77 |
| 10 Dairi | 1,20 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,20 |
| 11 Karo | 2,66 | 2,65 | 2,62 | 2,57 | 2,66 |
| 12 Deli Serdang | 13,48 | 13,50 | 13,52 | 13,51 | 13,48 |
| 13 Langkat | 5,40 | 5,41 | 5,37 | 5,33 | 5,40 |
| 14 Nias Selatan | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,83 |
| 15 Humbang Hasundutan | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,74 | 0,78 |
| 16 Pakpak Bharat | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 17 Samosir | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 |
| 18 Serdang Bedagai | 3,54 | 3,51 | 3,49 | 3,48 | 3,54 |
| 19 Batu Bara | 4,46 | 4,37 | 4,32 | 4,27 | 4,46 |
| 20 Padang Lawas Utara | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 21 Padang Lawas | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,38 |
| 22 Labuhanbatu Selatan | 3,35 | 3,33 | 3,36 | 3,36 | 3,35 |
| 23 Labuhanbatu Utara | 3,10 | 3,07 | 3,07 | 3,04 | 3,10 |
| 24 Nias Utara | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,44 |
| 25 Nias Barat | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| 26 Sibolga | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 |
| 27 Tanjungbalai | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,06 |
| 28 Pematangsiantar | 1,86 | 1,84 | 1,80 | 1,76 | 1,86 |
| 29 Tebing Tinggi | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,75 |
| 30 Medan | 28,94 | 29,30 | 29,45 | 29,75 | 28,94 |
| 31 Binjai | 1,47 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,47 |
| 32 Padangsidimpuan | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 33 Gunungsitoli | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,63 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

*) Angka Sementara/ Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara

Lampiran 3 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota ADHK 2010 di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

| | Kabupaten/Kota | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ^{*)} | 2019 ^{**)} |
|----|-------------------------|------|------|------|--------------------|---------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Nias | 5,52 | 5,03 | 5,01 | 4,95 | 5,04 |
| 2 | Mandailing Natal | 6,21 | 6,18 | 6,09 | 5,79 | 5,30 |
| 3 | Tapanuli Selatan | 4,86 | 5,12 | 5,21 | 5,19 | 5,23 |
| 4 | Tapanuli Tengah | 5,08 | 5,12 | 5,24 | 5,20 | 5,18 |
| 5 | Tapanuli Utara | 4,89 | 4,12 | 4,15 | 4,35 | 4,62 |
| 6 | Toba | 4,50 | 4,76 | 4,90 | 4,96 | 4,88 |
| 7 | Labuhanbatu | 5,04 | 5,06 | 5,00 | 5,06 | 5,07 |
| 8 | Asahan | 5,57 | 5,62 | 5,48 | 5,61 | 5,64 |
| 9 | Simalungun | 5,24 | 5,40 | 5,13 | 5,18 | 5,20 |
| 10 | Dairi | 5,04 | 5,07 | 4,93 | 5,01 | 4,82 |
| 11 | Karo | 5,01 | 5,17 | 5,21 | 4,55 | 4,60 |
| 12 | Deli Serdang | 5,24 | 5,32 | 5,10 | 5,15 | 5,18 |
| 13 | Langkat | 5,03 | 4,98 | 5,05 | 5,02 | 5,07 |
| 14 | Nias Selatan | 4,43 | 4,41 | 4,56 | 5,02 | 5,03 |
| 15 | Humbang Hasundutan | 4,63 | 5,00 | 5,02 | 5,04 | 4,94 |
| 16 | Pakpak Bharat | 5,95 | 5,97 | 5,94 | 5,85 | 5,87 |
| 17 | Samosir | 5,77 | 5,27 | 5,35 | 5,58 | 5,70 |
| 18 | Serdang Bedagai | 5,05 | 5,14 | 5,16 | 5,17 | 5,28 |
| 19 | Batu Bara | 4,14 | 4,44 | 4,11 | 4,38 | 4,35 |
| 20 | Padang Lawas Utara | 5,94 | 5,96 | 5,54 | 5,58 | 5,61 |
| 21 | Padang Lawas | 5,74 | 6,06 | 5,71 | 5,96 | 5,64 |
| 22 | Labuhanbatu Selatan | 5,14 | 5,19 | 5,09 | 5,27 | 5,35 |
| 23 | Labuhanbatu Utara | 5,18 | 5,21 | 5,11 | 5,20 | 5,15 |
| 24 | Nias Utara | 5,44 | 4,59 | 4,43 | 4,42 | 4,65 |
| 25 | Nias Barat | 5,25 | 4,83 | 4,81 | 4,77 | 4,82 |
| 26 | Sibolga | 5,65 | 5,15 | 5,27 | 5,25 | 5,20 |
| 27 | Tanjungbalai | 5,57 | 5,76 | 5,51 | 5,77 | 5,79 |
| 28 | Pematangsiantar | 5,24 | 4,86 | 4,41 | 4,80 | 4,82 |
| 29 | Tebing Tinggi | 4,90 | 5,11 | 5,14 | 5,17 | 5,15 |
| 30 | Medan | 5,74 | 6,27 | 5,81 | 5,92 | 5,93 |
| 31 | Binjai | 5,40 | 5,54 | 5,39 | 5,46 | 5,51 |
| 32 | Padangsidempuan | 5,08 | 5,29 | 5,32 | 5,45 | 5,51 |
| 33 | Gunungsitoli | 5,79 | 6,03 | 6,01 | 6,03 | 6,05 |
| | Provinsi Sumatera Utara | 5,10 | 5,18 | 5,12 | 5,18 | 5,22 |

^{*)} Angka Sementara/ Preliminary Figures

^{**)} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara

Lampiran 4 : Kondisi Infrastruktur Jalan di Sumatera Utara

| Panjang Jalan Provinsi menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km), 2019 | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Kabupaten/Kota | Kondisi Jalan | | | | | |
| | Baik | Sedang | Rusak | Rusak Berat | Tidak Dirinci | Jumlah |
| 01 Nias | 1,00 | 10,00 | 1,00 | 0,30 | - | 12,30 |
| 02 Mandailing Natal | 57,15 | 53,90 | 3,70 | 37,20 | 21,26 | 173,21 |
| 03 Tapanuli Selatan | 59,37 | 35,85 | 1,40 | 16,50 | - | 113,12 |
| 04 Tapanuli Tengah | 37,20 | 19,30 | - | - | - | 56,50 |
| 05 Tapanuli Utara | 119,60 | 62,15 | 3,80 | 12,75 | 1,00 | 199,30 |
| 06 Toba Samosir | 81,90 | 33,70 | 3,38 | 36,80 | 36,90 | 192,68 |
| 07 Labuhanbatu | 42,85 | 72,80 | 0,45 | 6,40 | 19,00 | 141,50 |
| 08 Asahan | 81,58 | 90,30 | 0,90 | 49,75 | 32,03 | 254,56 |
| 09 Simalungun | 49,36 | 168,30 | 1,10 | 1,00 | - | 219,76 |
| 10 Dairi | 13,95 | 58,85 | 1,20 | 7,50 | - | 81,50 |
| 11 Karo | 13,55 | 55,75 | 0,30 | 0,20 | - | 69,80 |
| 12 Deli Serdang | 77,08 | 66,29 | 1,50 | 2,00 | - | 146,87 |
| 13 Langkat | 86,70 | 63,10 | 1,40 | 13,40 | - | 164,60 |
| 14 Nias Selatan | 0,60 | 16,00 | 3,10 | 4,00 | - | 23,70 |
| 15 Humbang Hasundutan | 60,70 | 71,94 | 0,40 | 1,00 | 3,10 | 137,14 |
| 16 Pakpak Bharat | 11,70 | 44,55 | - | 0,40 | 1,10 | 57,75 |
| 17 Samosir | 6,40 | 16,90 | 2,40 | 44,20 | 4,55 | 74,45 |
| 18 Serdang Bedagai | 57,91 | 109,03 | 3,00 | 0,80 | - | 170,74 |
| 19 Batu Bara | 29,35 | 25,87 | 0,13 | 0,30 | - | 55,65 |
| 20 Padang Lawas Utara | 47,05 | 43,10 | 2,90 | 25,05 | 10,40 | 128,50 |
| 21 Padang Lawas | 56,37 | 82,55 | 1,90 | 20,60 | - | 161,42 |
| 22 Labuhanbatu Selatan | - | - | - | - | - | - |
| 23 Labuhanbatu Utara | 15,00 | 12,70 | 0,10 | 6,20 | - | 34,00 |
| 24 Nias Utara | 46,75 | 30,80 | 5,50 | 25,75 | 9,80 | 118,60 |
| 25 Nias Barat | 11,30 | 42,10 | 4,20 | 16,10 | 10,60 | 84,30 |
| 71 Sibolga | 0,10 | 3,96 | - | - | - | 4,06 |
| 72 Tanjungbalai | 5,51 | 3,20 | - | - | - | 8,71 |
| 73 Pematangsiantar | 5,97 | 7,35 | - | - | - | 13,32 |
| 74 Tebing Tinggi | 2,56 | 1,56 | 2,85 | - | - | 6,97 |
| 75 Medan | 21,15 | 15,10 | 0,40 | 0,90 | - | 37,55 |
| 76 Binjai | 4,05 | 2,60 | - | - | - | 6,65 |
| 77 Padangsidimpuan | 11,70 | 12,90 | 0,60 | - | 7,00 | 32,20 |
| 78 Gunungsitoli | 7,70 | 14,74 | 1,50 | 0,30 | - | 24,24 |
| Sumatera Utara | 1 123,16 | 1 347,24 | 49,11 | 329,4 | 156,74 | 3 005,65 |
| Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara | | | | | | |
| Catatan : Data di kolom tidak terinci = tidak bisa dilewati | | | | | | |

Lampiran 5 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020

| Kabupaten/Kota | Angka Harapan Hidup (tahun) | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah) | IPM |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nias | 69,75 | 12,57 | 5,36 | 6.898 | 61,93 |
| Mandailing Natal | 62,60 | 13,32 | 8,62 | 9.684 | 66,79 |
| Tapanuli Selatan | 64,91 | 13,24 | 9,28 | 11.236 | 70,12 |
| Tapanuli Tengah | 67,15 | 13,06 | 8,62 | 10.071 | 69,23 |
| Tapanuli Utara | 68,63 | 13,69 | 9,85 | 11.648 | 73,47 |
| Toba Samosir | 70,08 | 13,45 | 10,52 | 12.154 | 75,16 |
| Labuhan Batu | 69,93 | 12,73 | 9,24 | 11.150 | 72,01 |
| Asahan | 68,26 | 12,60 | 8,79 | 10.890 | 70,29 |
| Simalungun | 71,22 | 12,78 | 9,60 | 11.308 | 73,25 |
| Dairi | 69,00 | 13,10 | 9,58 | 10.350 | 71,57 |
| Karo | 71,40 | 12,76 | 9,79 | 12.349 | 74,43 |
| Deli Serdang | 71,73 | 13,35 | 10,09 | 12.225 | 75,44 |
| Langkat | 68,80 | 13,05 | 8,65 | 11.071 | 71,00 |
| Nias Selatan | 68,74 | 12,23 | 5,85 | 6.974 | 61,89 |
| Humbahas | 69,27 | 13,28 | 9,54 | 7.850 | 68,87 |
| Pakpak Barat | 65,74 | 13,86 | 9,03 | 8.170 | 67,59 |
| Samosir | 71,27 | 13,47 | 9,43 | 8.422 | 70,63 |
| Serdang Bedagai | 68,68 | 12,60 | 8,54 | 10.950 | 70,24 |
| Batu Bara | 66,96 | 12,63 | 8,06 | 10.410 | 68,36 |
| Paluta | 67,17 | 12,87 | 9,37 | 9.987 | 69,85 |
| Padang Lawas | 67,09 | 13,03 | 9,01 | 8.807 | 68,25 |
| Labusel | 68,71 | 13,00 | 8,75 | 11.495 | 71,40 |
| Labura | 69,46 | 13,04 | 8,40 | 11.779 | 71,61 |
| Nias Utara | 69,43 | 13,03 | 6,58 | 6.064 | 62,36 |
| Nias Barat | 68,96 | 12,94 | 6,49 | 5.830 | 61,51 |
| Kota Sibolga | 69,01 | 13,16 | 10,40 | 11.473 | 73,63 |
| Kota Tanjung Balai | 63,27 | 12,50 | 9,44 | 11.132 | 68,65 |
| Kota P. Siantar | 73,55 | 14,45 | 11,16 | 12.372 | 78,75 |
| Kota Tebing Tinggi | 70,87 | 12,72 | 10,31 | 12.876 | 75,17 |
| Kota Medan | 73,14 | 14,74 | 11,39 | 14.890 | 80,98 |
| Kota Binjai | 72,38 | 13,62 | 10,93 | 10.997 | 75,89 |
| Kota P. Sidempuan | 69,41 | 14,54 | 11,00 | 10.856 | 75,22 |
| Kota Gunung Sitoli | 71,19 | 13,74 | 8,61 | 7.980 | 69,31 |
| SUMATERA UTARA | 69,10 | 13,23 | 9,54 | 10.420 | 71,77 |